



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGUT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan S1, Tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx, sebagai **Penggugat**,  
**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Malaysia, 13 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Payakumbuh Barat, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, Pada Tanggal 22 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/033/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 3 hari lamanya, kemudian pindah kerumah orang tau Tergugat di xxxxxxxxxx, selama lebih kurang 3 hari lamanya, dan terakhir pindah ke No. 949 JL. Kedidi 2 Taman Paroi Jaya Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Asuh, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 2018;
4. Bahwa semenjak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan keluarga Tergugatlah yang mengontrol semua keuangan dan Tergugat juga yang membeli perlengkapan dan kebutuhan keluarga karena Tergugat kurang percaya kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang menerima orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat saja seperti dalam mengirimkan uang untuk orang tua Tergugat hampir setiap bulan sementara untuk orang tua Penggugat Cuma 3 kali dalam setahun, dan disaat Penggugat mencoba membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat malah menjawab dengan kata-kata kasar dan mengatakan kepada Penggugat (itu orang tuamu bukan tanggung jawab saya), semetara Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mencari uang tambahan sendiri;

Hal. 2 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat pernah menyembunyikan paspor Penggugat karena Penggugat ingin pulang kampung dan membawa anak karena saat itu Penggugat ingin bekerja untuk menambah uang tambahan buat Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, akan tetapi jika nafkah cukup diberikan oleh Tergugat Penggugat tidak akan menuntut untuk bekerja;
- 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat seperti mengatakan Penggugat orang miskin yang tak tau diuntung;
- 4.5. Tergugat sering tidak mengizinkan Penggugat untuk keluar rumah, baik itu pergi bersama saudara Tergugat maupun acara lainnya, apapun kegiatan Penggugat diluar rumah Tergugat tetap ikut dengan Penggugat dengan alasan tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juli 2022 saat itu Penggugat ingin ikut bekerja bersama Tergugat untuk membantu Tergugat berjualan dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut bekerja dengan berbagai alasan yang tidak jelas, namun Tergugat tetap memakai karyawan untuk membantu Tergugat ditempat kerja, dan kemudian Penggugat mencoba membicarakan kepada Tergugat agar Penggugat saja yang ikut membantu Tergugat dalam bekerja karena Penggugat juga tidak ada kegiatan namun Tergugat malah marah-marah dan Tergugat menampar bagian telinga Penggugat sampai gendang telinga Penggugat mengalami kerusakan, dan saat itu Tergugat mengatakan bahwa kejadian tersebut bukan disengaja padahal Tergugat saat itu dalam keadaan marah kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Penggugat sudah merasa capek dengan sikap Tergugat yang tidak memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan Penggugat mencoba untuk sabar dan tenangin diri sebelum Tergugat dengan Penggugat pulang kampung karena jika Penggugat saja yang pulang dengan anak tanpa sepengetahuan Tergugat Penggugat akan

Hal. 3 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggap oleh pihak kepolisian karena membawa lari anak yang telah menjadi warga negara malaysia sementara status Penggugat masih memakai KTP indonesia, dan Penggugat mencoba memperbaiki sikap Penggugat untuk membujuk Tergugat dan mengikuti semua keinginan Tergugat agar bisa pulang kampung bersama dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat dengan Penggugat pulang kampung karena mau lebaran dikampung, dan sebelum Penggugat dengan Tergugat pulang kampung Penggugat menghubungi keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat di Dumai dan tidak mau ikut lagi bersama dengan Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat, dan setelah sampai dipelabuhan Dumai keluarga Penggugat sudah menunggu Penggugat dan tidak lama kemudian keluarga Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat terlebih dahulu, dan setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat tidak mau ikut lagi dengan Tergugat ke Malaysia;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 6 Juli 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Asuh berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Anak Asuh**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Hal. 5 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 0033/033/I/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2017, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Seibu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa waktu menikahnya;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Negeri Sembilan, Malaysia;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan Tergugat juga sering menelepon saksi dan mengakui kesalahannya;
  - Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat dimana Tergugat melarang

Hal. 6 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ





Penggugat keluar rumah dan pulang kampung dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah, Penggugat juga keberatan Tergugat terlalu berlebihan memberikan perhatian kepada orang tuanya sedangkan kepada orang tua Penggugat tidak terlalu diperhatikan, saksi juga melihat dihandphone Penggugat jika Tergugat berkata-kata kasar dan menyampaikan Penggugat miskin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022, saksi menjemput Penggugat ke pelabuhan Dumai karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sedangkan Tergugat ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Payakumbuh;
  - Bahwa setelah berpisah, Tergugat dan keluarga pernah datang ke tempat Penggugat untuk meminta maaf dan meminta untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali, terakhir 20 (dua puluh) hari yang lalu Tergugat datang untuk melihat anak;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- 2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Negeri Sembilan, Malaysia;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat pulang kampung pada tanggal 6 Juli 2022 dan selebihnya saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga kurang memberikan nafkah sedangkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, Tergugat lebih memperhatikan orang tuanya dimana Tergugat selalu mengirimkan uang dan ketika Penggugat meminta untuk memperhatikan orang tuanya, Tergugat keberatan, Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama namun paspor selalu disembunyikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 Juli 2022, Penggugat dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Dumai, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa 40 (empat) puluh hari yang lalu Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk melihat anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil rukun kembali disebabkan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxx Baru, di mana Kecamatan xxxxxx Baru termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada tanggal 06 Juli 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Hal. 11 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat**, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. **Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2017 dan yang tercatat di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Negeri Sembilan, Malaysia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering berkata-kata kasar dan menyampaikan Penggugat miskin, Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga kurang memberikan nafkah sedangkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, Tergugat lebih memperhatikan orang tuanya dimana

Hal. 12 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Tergugat selalu mengirimkan uang dan ketika Penggugat meminta untuk memperhatikan orang tuanya, Tergugat keberatan, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama namun paspor selalu disembunyikan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak bulan Juli 2022, keluarga Penggugat menjemput Penggugat ke pelabuhan Dumai, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak bulan Juli 2022, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran  $\pm$  sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan pisah rumah  $\pm$  sejak bulan Juli 2022 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan,

Hal. 13 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Hal. 14 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ





Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak bulan Juli 2022, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap

Hal. 15 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2. Kaidah Fiqhiyah

نَرَى الْمَقَاسِدَ مُقَدَّمَ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan*".

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفَى

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,

Hal. 16 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhura;

**3. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Hal. 17 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Nurhadi, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Robbil Alfires, S.Sy**

Hal. 18 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Syahminar, S.H.I, M.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.SJJ